

## **Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja pada Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

**Airin Mentari, Nurhidayat, Siti Aisah Rahmah Wati, Zainal Umaaya**

Departemen Akuntansi, STEI Jakarta, Indonesia

\*email korespondensi : [airinmentari89@gmail.com](mailto:airinmentari89@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the impact of the budget cuts on the performance of the Financial and Development Supervisory Agency. This research was carried out at Finance and Development Supervisory Agency Representatives of Riau because it is an echelon II unit that best represent the main business of Finance and Development Supervisory Agency, namely supervision of state/regional finance and national development. The study used a qualitative approach with case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews with participants selected by purposive sampling and through document review. The results of this study indicate that the performance of Finance and Development Supervisory Agency Representatives of Riau was successful even though it was affected by budget cuts. This can happen because the Finance and Development Supervisory Agency Representatives of Riau has a method of implementing supervision, namely carrying out several assignments at the same locus at the same time.*

**Keywords:** Budget; Budget Cuts; Expenditure; Performance,

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemotongan anggaran belanja pada kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau karena merupakan unit eselon II yang paling mewakili urusan utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan partisipan yang dipilih secara purposive sampling dan melalui telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau berhasil meskipun terdampak pemotongan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena, Perwakilan BPKP Provinsi Riau memiliki metode pelaksanaan pengawasan yaitu melaksanakan beberapa penugasan pada lokus yang sama pada waktu yang bersamaan.

**Keyword:** Budget; Budget Cuts; Expenditure; Performance

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, masih dibutuhkan tambahan anggaran dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional yang antara lain dipenuhi dari pemotongan anggaran belanja K/L TA 2021. Maka, Menteri Keuangan membuat kebijakan pemotongan yang dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-

629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dananya bersumber dari APBN juga mengalami pemotongan anggaran. BPKP termasuk kelompok K/L dengan pagu kecil.

Pagu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam APBN TA 2021 yang semula Rp1.591.703.537,00 dipotong sebesar Rp111.329.084.000,00 berdasarkan Surat

Menteri Keuangan Nomor  
S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021.

Menurut Siti Habibah (2018) bahwa meskipun terdampak pemotongan anggaran, kinerja Ditjen Tanaman Pangan maupun Badan Ketahanan Pangan bisa berhasil. Untuk membenarkan atau membantah hasil tersebut, maka peneliti harus menganalisis dampak pemotongan anggaran belanja terhadap capaian kinerja. Apakah kinerja bisa berhasil meskipun terdampak pemotongan anggaran. Upaya apa yang dilakukan untuk bertahan dengan keadaan ini.

Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dijadikan obyek penelitian dengan pertimbangan unit tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang paling mencerminkan urusan utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yakni pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan sudah dapat mewakili analisis atas pemotongan anggaran pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPKP, anggaran belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau dipotong sebesar Rp2.129.296.000,00.

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya (Sri Rahayu & Andry Arifian Rachman, 2013:4). Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara untuk memenuhi pengeluaran (Halim & Kusufi, 2014).

Saat menilai penerapan pemotongan anggaran, para peneliti menggunakan lima kriteria. Kelima kriteria tersebut ialah:

1. besaran pemotongan ditentukan secara sama atau berbeda untuk setiap unit organisasi;
2. jenis belanja yang dipotong (operasional, program, atau belanja modal);
3. faktor yang memengaruhi penerapan pemotongan anggaran (eksternal atau internal);
4. pengambilan keputusan tentang hal-hal dan cara pemotongan ditentukan secara sentral atau diserahkan ke masing masing agency (sentralisasi atau desentralisasi); dan
5. langkah atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi publik saat menghadapi pemotongan. (Levasseur & Raunce, 2015),

Menteri Keuangan RI 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah: “Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

*Output* adalah sesuatu yang akan dihasilkan atau dibuat oleh aktivitas tertentu (Knowlton & Philips, 2013:36). Menteri Keuangan RI 208/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah: “*Output* adalah barang/ jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan”.

Penelitian terdahulu, Levasseur & Rounce (2015) yang mempelajari cara instansi pemerintah di Canada menghadapi pemotongan anggaran pada masa pemerintahan Perdana Menteri Harper. Menurut Itzgerald & Lupton (2015) meneliti dampak pemotongan anggaran pada tiga distrik di London. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah sangat tertekan karena langkah penghematan dari pemerintah Inggris sejak tahun 2010. Faktor politis, historis, geografis, dan kondisi finansial terbukti memengaruhi respons dalam menghadapi pemotongan. Pemerintah daerah merespons dengan cara,

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.681>

reinvestasi, efisiensi, dan penghematan. Ketiga langkah tersebut mampu membangkitkan pemerintah daerah dari tekanan eksternal. Menurut Hastings (2015) pemotongan terhadap anggaran dewan kota di Inggris dan Skotlandia berdampak pada turunnya kualitas pelayanan publik bagi warga, misalnya jam buka perpustakaan yang berkurang, waktu tunggu pelayanan yang lebih lama, dan lingkungan yang memburuk akibat pengurangan anggaran pembersihan dan pemeliharaan lingkungan.

## METODE

Metode penelitian berupa kualitatif dengan desain studi kasus menjadi metode yang dipilih dalam melakukan penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara semi terstruktur yang diperoleh langsung dari sumber yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran, DIPA Awal 2021 dan DIPA Revisi 2021, RKA K/L 2021 dan laporan kinerja 2021 dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau, buku-buku publikasi, hasil penelitian, dan literatur yang berhubungan dengan pemotongan anggaran dan kinerja pada sektor publik. Objek penelitian adalah Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Adapun partisipan yang diwawancarai berjumlah dua orang dan merupakan pejabat yang terkait dengan proses penganggaran dan evaluasi kinerja. Partisipan wawancara disajikan berikut ini:

| Partisipan Penelitian | Jabatan                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Narasumber 1 (N1)     | Kepala Sub Bagian Keuangan                 |
| Narasumber 1 (N2)     | Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Anggaran |

Metode penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik analisa data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh. Selama dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, transkripsi wawancara dan hasil coding divalidasi dengan member checking, dan masing-masing temuan penelitian divalidasi dengan triangulasi Hasil penelitian lalu disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemotongan anggaran, Perwakilan BPKP Provinsi Riau segera menindaklanjutinya dengan melaksanakan pengurangan pagu belanja melalui revisi anggaran TA 2021. Tahap awal dan keputusan akhir berada pada Sekretaris Utama BPKP. Mekanisme penentuan besaran pemotongan anggaran menggunakan pendekatan top down. Hal ini dikarenakan waktu penyampaian revisi anggaran ke Kementerian Keuangan terbatas. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021, besaran pemotongan anggaran belanja mengurangi pagu unit kerja pada dokumen anggarannya atau DIPA dan diperhitungkan dalam APBN Perubahan TA 2021.

**Tabel1.** APBN

| Kegiatan                                | Pagu                         |                               | Bertambah/<br>Berkurang<br>(ribuan rupiah) |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                         | Semula<br>(ribuan<br>rupiah) | Menjadi<br>(ribuan<br>rupiah) |                                            |
| Pengawasan Pembangunan di Provinsi Riau | 5.468.587                    | 3.339.291                     | - 2.129.296                                |
| Pelaksanaan Dukungan Manajemen          | 23.350.240                   | 23.350.240                    | -                                          |

Jika dilihat dari matriks diatas, maka kegiatan Pengawasan Pembangunan di Provinsi Riau yang terdampak dalam kebijakan pemotongan. Hal ini disebabkan

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.681>

karena sejalan dengan surat menteri keuangan bahwa pemotongan dan penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas yang mana masuk dalam kategori belanja barang. Adapun kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja modal tidak terpengaruh. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya waktu pengajuan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan, sehingga proses besaran pemotongan anggaran dilakukan secara top down untuk menghemat waktu.

### Dampak Pemotongan Anggaran Belanja Terhadap Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh dua isu atas tema dampak pemotongan terhadap kinerja pencapaian *output* dan pencapaian target pada perjanjian kinerja.

#### Pencapaian Output

Dengan adanya pemotongan anggaran, ada kondisi yang terjadi berkaitan dengan pencapaian *output*. Kondisinya berupa pencapaian *output* berhasil bahkan ada yang mencapai kategori sangat berhasil karena dapat dilakukan revisi target. Hasilnya adalah 10 *output* termasuk kategori sangat berhasil dan 18 *output* tergolong berhasil.

**Tabel 2. Output**

| <i>Output</i>                                                                                   | Progres % | Kategori        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman    | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | 111,11    | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK                    | 108,33    | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK                 | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK                       | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah | 104,76    | Sangat Berhasil |

| <i>Output</i>                                                                                                              | Progres % | Kategori        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah                         | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah                               | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara                                          | 112       | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara                                          | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi                                                | 112,5     | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi                                                         | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA                                                                            | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman              | 166,67    | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman           | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK                              | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK                           | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK                                 | 200       | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Laporan) | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah              | 166,67    | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara                         | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara                         | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara                               | 100       | Berhasil        |

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.681>

| Output                                                                                       | Progres % | Kategori        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi | 125       | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi          | 100       | Berhasil        |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP                | 150       | Sangat Berhasil |
| Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional                                        | 100       | Berhasil        |
| Layanan Dukungan Manajemen                                                                   | 100       | Berhasil        |

### Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Riau memiliki dua puluh enam indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja TA 2021. Dari 26 indikator tersebut, 14 indikator mencapai kategori sangat berhasil dan 12 indikator mencapai kategori berhasil. Pemotongan anggaran ternyata tidak berpengaruh terhadap pencapaian target perjanjian kinerja. Upaya yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Riau agar dapat memenuhi capaian kinerja adalah melakukan metode pelaksanaan pengawasan dengan cara melaksanakan beberapa penugasan pada lokus yang sama pada waktu yang bersamaan.

**Tabel 3.** Indikator Kinerja

| INDIKATOR KINERJA                                            | CAPAIAN % | KATEGORI        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi        | 1.070,54  | Sangat Berhasil |
| Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi                | 907,44    | Sangat Berhasil |
| Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah                | 100,57    | Sangat Berhasil |
| Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah                | 1.141,05  | Sangat Berhasil |
| Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target | 100       | Berhasil        |
| Jumlah BUMD dengan kinerja sehat                             | 100       | Berhasil        |
| Jumlah BLUD dengan kinerja sehat                             | 100       | Berhasil        |

| INDIKATOR KINERJA                                                                     | CAPAIAN % | KATEGORI        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan                                             | 100       | Berhasil        |
| Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti                | 100       | Berhasil        |
| Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti | 133,33    | Sangat Berhasil |
| Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3                           | 100       | Berhasil        |
| Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3                     | 100       | Berhasil        |
| Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3                                  | 100       | Berhasil        |
| Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3                            | 100       | Berhasil        |
| Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3                                       | 100       | Berhasil        |
| Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa                    | 221,37    | Sangat Berhasil |
| Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes                                     | 200       | Sangat Berhasil |
| Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai                      | 100       | Berhasil        |
| Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja                                                 | 117,88    | Sangat Berhasil |
| Skor IKPA Unit Kerja                                                                  | 100,08    | Sangat Berhasil |
| Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP                                     | 105,26    | Sangat Berhasil |
| Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja                                                      | 105       | Sangat Berhasil |
| Nilai SAKIP Unit Kerja                                                                | 105,2     | Sangat Berhasil |
| Persentase Penyelesaian RTP                                                           | 100       | Berhasil        |
| Persentase efektifitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)                          | 104,49    | Sangat Berhasil |
| Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja                                                    | 120,77    | Sangat Berhasil |

### KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemotongan anggaran TA 2021



DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.681>

pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah mengikuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021. Terkait dengan pencapaian kinerja yang digambarkan dari *output* dan indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja TA 2021 pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, telah termasuk kategori berhasil bahkan ada yang mencapai kategori sangat berhasil. Pemotongan anggaran belanja tidak mempengaruhi keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau karena target *output* dapat direvisi dan memiliki metode pelaksanaan pengawasan dengan cara melaksanakan beberapa penugasan pada lokus yang sama pada waktu yang bersamaan.

Saran yang dapat diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, perlu menemukan metode pengawasan yang lain misalnya sosialisasi dan bimbingan teknis substansi pengawasan secara daring agar anggaran lebih efisien. Penelitian berikutnya dapat mengikutsertakan unit kerja lainnya sehingga dapat diperoleh pandangan yang lebih baik. Kedua, Penelitian hanya mengkaji kinerja dengan rentang waktu satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Fitzgerald, Amanda & Ruth Lupton. (2015). *The Limits to Resilience? The Impact of Local Government Spending Cuts in London*. Local Government Studies Vol. 41, No. 4 : 582-600

Habibah. (2018). *Dampak Pemotongan Anggaran Belanja pada Kinerja Kementerian Pertanian*. Universitas Gadjah Mada.

Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hastings, Annete, Nick Bailey, Glen Bramley, Maria Gannon, & David Watkins. (2015). *The Cost of The Cuts: The Impact on Local Government And Poorer Communities*. Universities of Glasgow and Heriot-Watt.

Knowlton, L.W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: Better strategies*

*for great results*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Levasseur, Karine & Andrea Rounce. (2015). *Public Policy and Operational Alignment in Light on Public Service Retrenchment-Lesson Learned from Canada*". International Review of Administrative Sciences 0 (0) 1-20.

Menteri Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta.

Menteri Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.

Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.

Menteri Keuangan. (2021). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021*. Jakarta.

Rahayu, Sri & Andry Arifian Rachman. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu